



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta



**LAPORAN MONITORING
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
S.D. BULAN SEPTEMBER 2022
PADA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA**

**PE.11.03/LPP-57/P3A/PW12/2022
10 OKTOBER 2022**



Nomor : PE.11.03/LPP-57/PW12/P3A/2022

10 Oktober 2022

Lampiran : Empat Eksemplar

Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta s.d.
Triwulan III Tahun 2022

Yth. Kepala Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta
di tempat

Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta s.d. Triwulan III Tahun 2022.

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta Nomor PE.11.03/ST-617/PW12/6/2022 Tanggal 30 September 2022

2. Pencapaian Target *Outcome* sesuai Perjanjian Kinerja

a. Pengawasan

Sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2022, Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta mempunyai 32 indikator kinerja kegiatan (IKK). Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 capaian kinerja diuraikan sebagai berikut:

1) IKK: Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi

Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp 4 676 825 617,00

Target IKK "Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi" pada Tahun 2022 sebesar Rp701.000.000,00 dan sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp350.000.000,00. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp4.676.825.617,00 atau 1.336,23% dari Target sebesar Rp 350.000.000,00, dan telah tercapai 667,16% dari target Tahun 2022 sebesar Rp701.000.000,00.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra periode Tahun 2020-2024 sebesar Rp1.029.000.000,00 maka capaian IKK "Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi" sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 telah tercapai 454,50%.

IKK “Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi” diukur dengan jumlah kurang bayar penerimaan daerah (pajak dan retribusi) yang sudah disetorkan/ditetapkan atas hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi” sebagai berikut:



Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi sebesar Rp4.676.825.617,00 merupakan hasil pengawasan BPKP pada Pemerintah Kabupaten Magelang sebesar Rp2.646.759.060,00 dan Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar Rp2.030.066.557,00.

2) IKK: Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi

Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp 4.928.678.670,00

Target IKK “Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi” pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.394.490.000,00 dan sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp1.197.000.000,00. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sudah tercapai sebesar Rp4.928.678.670,00, atau 205,83% (maksimal 120,00%) dari target Tahun 2022 sebesar Rp2.394.490.000,00.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra periode Tahun 2020-2024 sebesar Rp1.714.000.000,00 maka capaian potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 telah tercapai 287,55%.

IKK “Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi” diukur dengan jumlah selisih dari potensi penerimaan daerah dari hasil kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta dengan target yang dianggarkan oleh Daerah.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Nilai Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi sebesar Rp4.928.678.670,00 diperoleh dari evaluasi OPAD pada Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, berupa selisih potensi pajak daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp1.936.789.687,00 dan Kota Yogyakarta sebesar Rp2.991.888.983,00

3) IKK: Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara/ Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp 128.372.760.000,00

Target IKK “Nilai efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah” pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp154.478.000.000,00, dan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 adalah Rp153.728.000.000,00. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp128.372.760.000,00 atau 83,51% dari Target sebesar Rp 153.728.000.000,00, dan telah tercapai 83,10% dari target Tahun 2022 sebesar Rp154.478.000.000,00.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra periode Tahun 2020-2024 sebesar Rp112.939.000.000,00 maka capaian nilai efisiensi pengeluaran

negara/daerah sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 telah tercapai 113,67%.

IKK “Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah” diukur dengan nilai pengurangan/pengalihan rencana belanja proyek/program/kegiatan yang tidak tepat.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah” dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Capaian Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah sebesar Rp128.772.760.000,00 merupakan hasil dari penugasan evaluasi Perencanaan dan Penganggaran, berupa temuan potensi tidak efektif dan tidak efisien yang dilakukan pada tiga Pemerintah Daerah.

4) IKK: Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah

Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp783.960.000,00

Target IKK “Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah” pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp99.430.000.000,00. Target atas IKK tersebut ditetapkan dalam Triwulan IV Tahun 2022, sehingga belum ada penetapan target sampai dengan Triwulan III Tahun 2022. Namun demikian sampai dengan

dengan Triwulan III Tahun 2022 sudah terdapat realisasi sebesar Rp783.960.000,00 atau 0,79% dari target Tahun 2022 sebesar Rp99.430.000.000,00.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra periode Tahun 2020-2024 sebesar Rp103.964.000.000,00 maka capaian nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 telah tercapai 0,75%.

IKK "Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah" diukur dengan nilai belanja yang dikembalikan ke kas negara/daerah termasuk denda dari hasil pengawasan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta dan nilai aset yang dipulihkan.

Perbandingan target dan realisasi "Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah" dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Capaian Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah sebesar Rp783.960.000,00 merupakan hasil dari penugasan audit PKN dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana BOS sebesar Rp299.960.000,00 dan Audit Keuangan atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri sebesar Rp484.000.000,00.

5) IKK: Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target

Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sejumlah 2 PSN

Target IKK “Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target” pada Tahun 2022 maupun sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebanyak 1 PSN. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sudah terealisasi sebanyak 2 PSN atau 200,00% (maksimal 120,00%) dari target Tahun 2022 sebanyak 1 PSN.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra periode Tahun 2020-2024 sebanyak 1 PSN maka capaian “Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target” sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 telah tercapai 200,00%.

PSN yang tercapai sesuai target yaitu:

- PSN Pembangunan Infrastruktur Bandara Udara Internasional Yogyakarta pada PT. Angkasa Pura I (Persero)
- PSN Pembangunan Akses Kereta Api Bandara Baru Yogyakarta-Kulon Progo pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah.

IKK “Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target” diukur dengan jumlah PSN yang tercapai target atas total jumlah PSN yang dilakukan pengawasan.

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



6) IKK: Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan

Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar 0,00 %

Target IKK “Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan” pada Tahun 2022 adalah sebesar 85,00%. Target atas IKK tersebut ditetapkan dalam Triwulan IV Tahun 2022, sehingga belum ada penetapan target maupun capaian realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022.

Hambatan kelancaran pembangunan (HKP) adalah sebuah kondisi dimana proses pembangunan tidak dapat mencapai *output*, *outcome* dan manfaat yang ditetapkan karena adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan kewenangan para pihak terkait. IKK Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan diukur dengan jumlah laporan evaluasi hasil kelancaran pembangun (LEHKP) yang kesepakatnya terlaksana dibagi dengan total penugasan EHKP yang diterbitkan.

Perbandingan target dan realisasi “Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



7) IKK: Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik

Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sejumlah 1 BUMN

Target IKK “Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik” pada Tahun 2022 dan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sejumlah 1 BUMN. Sampai dengan Triwulan III telah

terrealisasi sejumlah 1 BUMN atau telah tercapai 100,00% dari target Tahun 2022 maupun target akhir Renstra 2020-2024 sejumlah 1 BUMN.

IKK Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik, pengukurannya dari jumlah BUMN yang tata kelolanya baik dari kegiatan *Assessment Good Corporate Governance*.

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Realisasi Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik berupa hasil self PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) dengan nilai sebesar 82,22 kategori baik.

8) IKK: Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat

Jumlah BUMD dengan kinerja sehat sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebanyak 11 BUMD

Target IKK “Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat” pada Tahun 2022 dan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebanyak 11 BUMD. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sudah terealisasi sebesar 11 BUMD atau tercapai 100,00% dari target Tahun 2022 maupun target akhir Renstra 2020-2024 sebesar 11 BUMD.

IKK “Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat” diukur dari jumlah BUMD dengan kinerja sehat dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP ataupun assessor lainnya berdasarkan kriteria penilaian mencapai kategori “Sehat” Rincian BUMD dengan kinerja sehat hasil evaluasi kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

No.	Nama BUMD	Skor*)	Predikat
-----	-----------	--------	----------

1.	Perumda Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul	3,37	Sehat
2.	Perumda Air Minum Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo	3,59	Sehat
3.	Perumda Air Minum Tirta Sembada Kabupaten Sleman	2,99	Sehat
4.	Perumda Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta	3,25	Sehat
5.	Perumda Air Minum Tirta Projotamansari, Kabupaten Bantul	3,80	Sehat
6.	Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa, Kabupaten Kebumen	3,81	Sehat
7.	Perumda Air Minum Tirta Wijaya, Kabupaten Cilacap	3,40	Sehat
8.	Perumda Air Minum Kota Magelang	2,87	Sehat
9.	Perumda Air Minum Tirta Merapi Kabupaten Klaten	4,13	Sehat
10.	Perumda Air Minum Tirta Gemilang, Kabupaten Magelang	3,60	Sehat
11.	Perumda Air Minum Tirta Perwitasari, Kabupaten Purworejo	3,49	Sehat

Keterangan:

*) nilai hasil evaluasi kineja belum validasi pusat, validasi rencana di triwulan III Tahun 2022)

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



9) IKK: Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat.

Jumlah BLUD dengan kinerja sehat sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebanyak 1 BLUD

Target IKK “Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat” pada Tahun 2022 dan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebanyak 1 BLUD. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sudah terealisasi sebanyak 1 BLUD atau telah tercapai 100,00% dari target Tahun

2022. Jika dibandingkan dengan targe akhir renstra Tahun 2020 - 2024 telah tercapai 50,00% dari target sebanyak dua BLUD.

IKK "Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat" diukur dari jumlah BLUD dengan kinerja sehat dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP ataupun *assessor* lainnya berdasarkan kriteria penilaian mencapai kategori "Sehat".

Jumlah BLUD dengan kinerja sehat yaitu RSUD Sudirman Kabupaten Kebumen berdasarkan evaluasi kinerja dengan nilai 70,50 dengan kategori sehat.

Perbandingan target dan realisasi "Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat" dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



10) KK: Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan

Jumlah BUMDes yang mampu menyusun Laporan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebanyak 31 BUMDes

Target IKK " Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan " pada Tahun 2022 dan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebanyak 19 BUMDes. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 telah terealisasi sebanyak 31 BUMDes atau 100,00% dari Target sebanyak 14 BUMDes, dan telah tercapai 163,16% dari target Tahun 2022 sebanyak 19 BUMDes. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra periode Tahun 2020-2024 sebanyak 26 BUMDes maka capaian "Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan" sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 telah tercapai 119,23%.

Realisasi sebanyak 31 BUMDes terdiri dari BUMDes di Kabupaten sebanyak 11 BUMDes, Kabupaten Kebumen sebanyak 17 BUMDes dan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 3 BUMDes.

Perbandingan target dan realisasi "Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan Keuangan" dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:



11) IKK: Presentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti

Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar 100%

Target IKK " Presentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti" pada Tahun 2022 adalah 100%, dan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar 100%. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 telah terealisasi sebesar 100% dari target sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 maupun target Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra periode Tahun 2020-2024 sebesar 100 % maka capaian "Presentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti" sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 telah tercapai 100%.

Pengawasan BPKP Bidang Investigasi yang bersifat represif dalam konteks untuk pengendalian korupsi meliputi pelaksanaan audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN), pemberian keterangan ahli. IKK " Presentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti" dukur dengan jumlah KLPBU/APH yang menindaklanjuti rekomendasi jumlah penugasan pengawasan dibagi dengan jumlah pengawasan represif.

Capaian 100 % merupakan tindak lanjut berupa Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di Hadapan Penyidik atas Perkara Dugaan Tipikor atas *Jasa Fullboard Meeting* pada suatu unit kerja.

Perbandingan target dan realisasi " Presentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti" dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:



12) IKK: Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti

Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar 100,00%

Target IKK "Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti" pada Tahun 2022 dan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar 80,00%. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sudah ada realisasi sebesar 100,00% atau tercapai telah tercapai

125,00% (maksimal 120,00%) dari target Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra Tahun 2020 - 2024 telah tercapai 111,11% dari target sebesar 90,00%.

Kinerja efektivitas hasil pengawasan ini diukur dengan menghitung hasil pengawasan edukatif dan preventif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti dengan penugasan pengawasan preventif/edukatif yang telah dilaksanakan.

Perbandingan target dan realisasi "Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti" dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



Capaian kinerja tersebut didukung dengan pemanfaatan hasil pengawasan edukatif dan preventif atas kegiatan berikut:

- Penyusunan profil risiko *fraud* atas Perencanaan dan Penganggaran APBD pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
- Penyusunan profil risiko *fraud* atas Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan pada Kabupaten Sleman;
- Penyusunan profil risiko *fraud* atas kemudahan berusaha dan berinvestasi dengan penerapan *Online Single Submission (OSS)* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo.
- Penyusunan profil risiko *fraud* atas dana Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah, melalui Ketepatan dan Efektivitas Penggunaan Dana Transfer (fokus pada sektor pendidikan dasar dan menengah) pada Pemerintah Daerah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
- Penyusunan Profil Risiko Fraud atas Optimalisasi Program Padat Karya pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Seluruh hasil kegiatan tersebut seluruhnya dimanfaatkan untuk pengendalian kecurangan.

13) IKK: Jumlah Pemda menindak lanjuti *Area Of Improvement* dari hasil pengukuran EPK

Jumlah Pemda menindak lanjuti *Area Of Improvement* dari hasil pengukuran EPK Triwulan III Tahun 2022 sebanyak 2 Pemda

Target IKK “Jumlah Pemda menindak lanjuti *Areas Of Improvement* dari hasil pengukuran EPK” pada Tahun 2022 dan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebanyak Pemda. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sudah terealisasi sebanyak 2 Pemda atau tercapai

200,00% (maksimal 120,00%) dari target Tahun 2022 sebanyak 1 Pemda. Jumlah Pemda menindak lanjuti *Area Of Improvement* dari hasil pengukuran EPK yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

IKK ini merupakan IKK baru yang muncul di Tahun 2022 sehingga belum ada target di akhir periode renstra Tahun 2020-2024.

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah Pemda menindak lanjuti *Areas Of Improvement* dari hasil pengukuran EPK” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



14) IKK: Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 1 APIP

Target IKK “Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” pada Tahun 2022 sebanyak 1 APIP. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 telah mencapai 100,00% dari target Tahun 2022 maupun akhir renstra tahun 2020-2024 sebanyak 1 APIP. Capaian Kapabilitas APIP \geq Level 3 berdasarkan SP-2388/D3/01/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan menggunakan pedoman

Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penilaian Kapabilitas APIP.

Penilaian Kapabilitas APIP telah dilakukan evaluasi kembali pada Tahun 2022 dengan menggunakan pedoman yang baru yaitu Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 19 November 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada K/L/D, namun belum ditetapkan level melalui ekspose kepada Tim Panel tingkat perwakilan.

Jika dibandingkan dengan target periode akhir renstra Tahun 2020 – 2024 telah tercapai 100%.

IKK Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 diukur berdasarkan hasil penetapan level kapabilitas APIP dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP. Target dan realisasi IKK Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 bersifat kumulatif.

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



15) IKK: Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebanyak 11 APIP

Target IKK “Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” pada Tahun 2022 sebanyak 11 APIP. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 telah mencapai 100,00% dari target Tahun 2022 maupun akhir renstra tahun 2020-2024 sebanyak 11 APIP. Capaian tersebut berdasarkan penilaian

dengan pedoman Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penilaian Kapabilitas APIP.

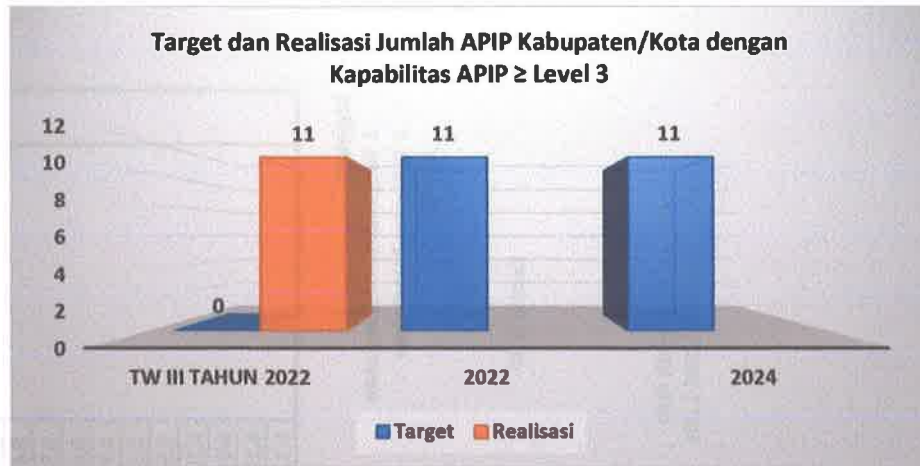
Penilaian Kapabilitas APIP telah dilakukan evaluasi kembali pada Tahun 2022 dengan menggunakan pedoman yang baru yaitu Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 19 November 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada K/L/D, namun belum ditetapkan level melalui ekspose kepada Tim Panel tingkat perwakilan.

IKK Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 diukur berdasarkan hasil penetapan level kapabilitas APIP dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP. Target dan realisasi IKK Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 bersifat kumulatif.

Capaian sasaran kegiatan APIP Kabupaten/Kota yang sudah mencapai Kapabilitas APIP level 3 sebagai berikut:

No	Nama APIP	Level	Status
1	Inspektorat Kabupaten Sleman	L3	SP-1917/D3/01/2018, tanggal 21 November 2018
2	Inspektorat Kabupaten Purworejo	L3	SP-745/D3/01/2019, tanggal 14 Mei 2019
3	Inspektorat Kabupaten Kulon Progo	L3	SP-1127/D3/04/2019, tanggal 29 Juli 2019
4	Inspektorat Kabupaten Cilacap	L3	SP-1584/D3/04/2019, tanggal 27 September 2019
5	Inspektorat Kabupaten Magelang	L3	SP-1934/D3/04/2019, tanggal 16 Oktober 2019
6	Inspektorat Kabupaten Gunungkidul	L3	SP-1935/D3/04/2019, tanggal 16 Oktober 2019
7	Inspektorat Kota Yogyakarta	L3	SP-2569/D3/04/2019, tanggal 27 Desember 2019
8	Inspektorat Kabupaten Bantul	L3	SP-2551/D3/04/2019, tanggal 27 Desember 2019
9	Inspektorat Kota Magelang	L3	SP-2600/D3/04/2019, tanggal 27 Desember 2019
10	Inspektorat Kabupaten Klaten	L3	SP-2601/D3/04/2019, tanggal 27 Desember 2019
11	Inspektorat Kabupaten Kebumen	L3	SP-899/D3/04/2021, tanggal 29 Desember 2021

Perbandingan target dan realisasi "Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3" dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



16) IKK: Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebanyak 1 Provinsi

Target IKK "Jumlah APIP Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3" pada Tahun 2022 sebanyak 1 Provinsi. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 telah mencapai 100,00% dari target Tahun 2022 maupun akhir renstra tahun 2020-2024 sebanyak

1 Provinsi. Capaian Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 sebanyak 1 Provinsi dengan menggunakan penilaian Maturitas SPIP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 maupun menggunakan pedoman baru yaitu Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah. Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemda D.I. Yogyakarta berdasarkan Penilaian *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2021.

Tahun 2022 dilakukan evaluasi kembali dan sampai dengan triwulan III Tahun 2022 masih dalam proses penugasan evaluasi.

IKK Jumlah Provinsi dengan dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 diukur berdasarkan hasil penetapan level Maturitas SPIP dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP. Target dan realisasi IKK Jumlah Provinsi dengan dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 bersifat kumulatif.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3" dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



17) IKK: Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebanyak 11 Kabupaten/Kota

Target IKK “Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” pada Tahun 2022 sebanyak 11 Kabupaten/Kota. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 telah mencapai 100,00% dari target Tahun 2022 maupun akhir renstra tahun 2020-2024 sebanyak 11 Kabupaten/Kota.

Capaian Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 sebanyak 11 Kabupaten/Kota dengan menggunakan penilaian Maturitas SPIP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016.

IKK Jumlah Kabupaten/Kota dengan dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 diukur berdasarkan hasil penetapan level Maturitas SPIP dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP. Target dan realisasi IKK Jumlah Kabupaten/Kota dengan dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 bersifat kumulatif.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



Namun demikian berdasarkan Penilaian *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2021 dengan menggunakan pedoman terbaru yaitu Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah, jumlah kabupaten/kota Pemerintah Daerah dengan Maturitas SPIP Terintegrasi \geq Level 3 sebanyak 4 kabupaten/kota yaitu:

- Kabupaten Sleman;
- Kabupaten Bantul;
- Kota Yogyakarta;
- Kabupaten Cilacap.

Tahun 2022 dilakukan evaluasi kembali dan sampai dengan triwulan III Tahun 2022 masih dalam proses penugasan evaluasi.

18) IKK: Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3

Target IKK "Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3" pada Tahun 2022 sebanyak 1 Provinsi. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 telah mencapai 100,00% dari target Tahun 2022 maupun akhir renstra tahun 2020-2024 sebanyak 1 Provinsi. Capaian tersebut berdasarkan berdasarkan Penilaian *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2021 dimana nilai skor MRI pada Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 3,20.

Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3 sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebanyak 1 Provinsi

Tahun 2022 dilakukan evaluasi kembali bersama dengan Evaluasi SPIP terintegrasi dan sampai dengan triwulan III Tahun 2022 masih dalam proses penugasan evaluasi.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



19) IKK: Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3

Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3 sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebanyak 0 Kabupaten/Kota

Target IKK “Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3” pada Tahun 2022 sebanyak 3 Kabupaten/Kota. Target atas IKK tersebut ditetapkan dalam Triwulan IV Tahun 2022, sehingga belum ada penetapan target maupun capaian realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022. Sampai dengan triwulan III Tahun 2022 masih dalam proses penugasan evaluasi bersama dengan evaluasi SPIP Terintegrasi.

Perkembangan IKK “Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



20) IKK: Prosentase Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Prosentase desa yang menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar 72,79%

Target IKK “Prosentase Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa pada Tahun 2022 sebesar 100,00% dan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar 100,00%.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 realisasi Persentase Desa yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebesar 72,79% berdasarkan laporan perkembangan implementasi SISKEUDES .

Perbandingan target dan realisasi Prosentase Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



21) IKK: Jumlah APIP yang mengimplementasikan Siswaskeudes

Jumlah APIP yang mengimplementasikan Siswaskeudes sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebanyak 5 APIP

Target IKK “Jumlah APIP yang mengimplementasikan Siswaskeudes pada Tahun 2022 maupun sampai dengan Triwulan III tahun 2022 sebanyak 4 APIP. Realisasi Jumlah APIP yang mengimplementasikan Siswaskeudes sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebanyak 5 APIP atau telah tercapai sebanyak 125,00% dari target tahun 2022 sebanyak 5 APIP, dan tercapai 83,33% dari target renstra 2020-2024 sebesar 6 APIP. APIP yang telah mengimplementasikan siswaskeudes yaitu:

- Inspektorat Kabupaten Bantul;
- Inspektorat Kabupaten Purworejo;
- Inspektorat Kabupaten Klaten;
- Inspektorat Kabupaten Kulon Progo.
- Inspektorat Kabupaten Sleman.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



22) IKK: Prosentase Pemda yang akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah

Prosentase Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar 58,33%

Target IKK “Prosentase Pemda yang akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah pada Tahun 2022 dan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar 66,67%. Realisasi Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

sebesar 58,33 % atau 7 pemda dari 12 pemda di wilayah kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta atau tercapai 87,49 % dari target.

Pemda yang akuntabel (efisien dan efektif) dalam pengelolaan keuangan dan kinerja tercermin dari Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB.

Indikator jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah diukur dengan menghitung jumlah Pemda yang memperoleh Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB.

Realisasi sebanyak 7 pemda berdasarkan capaian opini LKPD Tahun 2021 dan Evaluasi SAKIP Tahun 2021 sebagai berikut:

No	Pemerintah Daerah	Capaian Opini LKPD	Evaluasi SAKIP
1	Provinsi D.I Yogyakarta	WTP	AA
2	Kota Yogyakarta	WTP	A
3	Kabupaten Bantul	WTP	A
4	Kabupaten Sleman	WTP	A
5	Kabupaten Kulon Progo	WTP	A
6	Kabupaten Gunung Kidul	WTP	BB
7	Kabupaten Cilacap	WTP	BB

Perbandingan target dan realisasi IKK "Prosentase Pemda yang Akuntabel Dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah" dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



23) IKK: Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai

Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebanyak 277 Desa

Target IKK “Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai pada Tahun 2022 sebanyak 135 desa, dan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 95 desa. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai sejumlah

277 desa atau tercapai sebesar 291,58% dari target di triwulan III sebesar 95 desa. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2022 telah tercapai 205,19 % dari target sebesar 135 desa, sedangkan jika dibandingkan dengan target renstra 2020-2024 telah tercapai 54,21 % dari target sebesar 511 desa.

Pengelolaan aset desa memadai diukur dari pengujian atas pengendalian intern tata kelola aset desa. Target dan realisasi Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai bersifat kumulatif.

Capaian tersebut adalah berdasarkan hasil evaluasi tata kelola dan akuntabilitas aset desa serta tambahan data di Triwulan II Tahun 2022 (daftar rekap konsolidasi aset) sebagai berikut:

No	Kabupaten	Jumlah Desa
Evaluasi Tahun 2021		
1	Kabupaten Kulon Progo	8
2	Kabupaten Sleman	11
3	Kabupaten Gunungkidul	21
Evaluasi Tahun 2022		
4	Kabupaten Gunungkidul	10
Tambahan dari daftar rekap konsolidasi aset TW II		
5	Kabupaten Gunungkidul	120
6	Kabupaten Kebumen	107
Jumlah		277

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai ” dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



24) IKK: Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3

Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3 sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebanyak 0 BLUD

Target IKK “Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3 pada Tahun 2022 sebanyak 4 (empat) BLUD. Target atas IKK tersebut ditetapkan dalam Triwulan IV Tahun 2022, sehingga belum ada penetapan target maupun capaian realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022.

IKK Jumlah BLUD dengan MRI \geq level 3 diukur dengan Jumlah BLUD yang mengimplementasikan pengelolaan/ manajemen risiko.

Perbandingan Target dan Realisasi IKK “Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



b. Pendukung Pengawasan

Sesuai dengan perubahan perjanjian kinerja Tahun 2022, Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta mempunyai 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan (IKK) dengan capaian kinerja diuraikan sebagai berikut:

1) IKK: Nilai Zona Integritas Unit Kerja

Nilai Zona Integritas Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar 91,16

Target IKK “Nilai Zona Integritas Unit Kerja Tahun 2022 sebesar 90,00.

Nilai Skor Zona Integritas diukur sesuai dengan Pedoman Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.

Realisasi Nilai Zona Integritas Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar 91,16 berdasarkan penilaian dari Inspektorat BPKP.

Target dan realisasi IKK “Nilai Zona Integritas” dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



2) IKK: Skor IKPA Unit Kerja

Skor IKPA Unit Kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar 98,45

Target IKK “Skor IKPA Unit Kerja Tahun 2022 sebesar 95,00. Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar 98,45 atau tercapai sebesar 103,63 % dari target Tahun 2022 sebesar 95,00.

Skor IKPA diukur dengan skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Skor IKPA Unit Kerja” dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



3) IKK: Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP

Persentase penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar 100%

Target IKK “Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP” pada Tahun 2022 sebesar 100,00%. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 capaian telah tercapai 100,00% dari target Tahun 2022 maupun target akhir renstra periode 2020-2024 sebesar 100,00%. Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta telah menyusun Laporan Keuangan Tahun 2021 dengan Nomor: LAP-18/PW12/1/2022 tanggal 7 Februari 2022 dan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 dengan Nomor: LAP-227/PW12/1/2022 tanggal 23 Agustus 2022 seluruhnya telah disusun sesuai SAP (PP 71 Tahun 2010). Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP diukur dengan jumlah Laporan Keuangan yang sesuai kriteria SAP dibagi Laporan Keuangan yang terbit dikalikan 100%.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP” dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



4) IKK: Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja

Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar 0

Target IKK “Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja” pada Tahun 2022 sebesar 80,00. Target atas IKK tersebut ditetapkan dalam Triwulan IV Tahun 2022, sehingga belum ada penetapan target maupun capaian realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.

Pengelolaan BMN diukur berdasarkan hasil penilaian mandiri yang divalidasi oleh Biro Umum BPKP.

Target dan realisasi “Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja” dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



5) IKK: Nilai SAKIP Unit Kerja

Nilai SAKIP Unit Kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar 90,80

Target IKK “Nilai SAKIP Unit Kerja” pada Tahun 2022 sebesar 87,00. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 nilai sakip Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sebesar 90,80 dan telah tercapai 104,37% dari target Tahun 2022.

Nilai SAKIP diukur dengan hasil *Self Assesment* SAKIP yang telah dilakukan *Quality Assurance* (QA) oleh Inspektorat BPKP. Hal ini dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Eselon II dengan perencanaan strategis unit di bawahnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya. Tahun 2022 telah dilakukan evaluasi SAKIP oleh Inspektorat atas hasil *Self Assesment* SAKIP dengan nilai sementara sebesar 90,80.

Target dan realisasi IKK “Nilai SAKIP Unit Kerja” dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



6) IKK: Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)

Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja) Perwakilan D.I. Yogyakarta sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar 100,00%

Target IKK “Persentase Penyelesaian RTP” pada Tahun 2022 sebesar 100,00%. Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Triwulan III Tahun 2022 kegiatan pengendalian telah telah tercapai 100,00% yaitu dari sepuluh rencana kegiatan pengendalian seluruhnya telah ditindak lanjuti

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) unit kerja dihitung berdasarkan jumlah RTP yang diselesaikan dibagi dengan jumlah RTP dikali 100%. Penilaian ini digunakan dalam rangka menilai penerapan manajemen risiko pada unit kerja. Berdasarkan aplikasi yang digunakan oleh unit kerja yaitu Bewise. Perbandingan target dan realisasi capaian IKK “Persentase Penyelesaian RTP” dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



7) IKK: Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)

Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja) Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar 93%

Target IKK “Persentase Efektivitas Pengendalian Intern” pada Tahun 2022 sebesar 65,00%. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, sudah terealisasi sebesar 93%.

Efektivitas pengendalian intern dihitung dengan perhitungan (Jumlah pengendalian eksisting yang efektif +

Jumlah RTP yang selesai dan efektif) / (Jumlah seluruh pengendalian eksisting + Jumlah RTP yang Selesai) x 100%.

Persentase efektifitas pengendalian intern sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 telah tercapai 93% atau tercapai 143,08 dari target 65,00%. Persentase efektifitas pengendalian intern sebesar 93% dihitung sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
a. Jumlah Pengendalian <i>existing</i>	111
b. Jumlah Pengendalian <i>existing</i> efektif	103
c. Jumlah RTP	10
d. Jumlah RTP efektif	10
Persentase Efektifitas Pengendalian intern (b+d)/(a+c)x100%= 113/121= 93,38%	93 %

Perbandingan target dan realisasi capaian IKK "Persentase Penyelesaian RTP" dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.



8) IKK: Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja

Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja Perwakilan BPKP D.I. sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar 84,85

Target IKK "Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja" pada Tahun 2022 sebesar 75. Berdasarkan hasil survey kepuasan mitra BPKP Tahun 2022 nilai kepuasan mitra telah tercapai sebesar 84,85 atau telah tercapai sebesar 113,13%. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra Tahun 2020-2024 telah tercapai 101,01% dari target sebesar 81.

Indeks kepuasan layanan unit kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta diukur dengan hasil survey kepada para mitra di lingkungan unit kerja.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja" dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



Rincian target dan realisasi *outcome* sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 pada Lampiran.

3. Realisasi Input SHP dalam Aplikasi SIMA-X Triwulan III Tahun 2022

Berdasarkan monitoring hasil input Sintesa Hasil Pengawasan pada Aplikasi SIMA-X sampai dengan triwulan III (30 September 2022) Tahun 2022 sebagai berikut:

Bidang	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III	
	Target	Realisasi (TTE)	Target	Realisasi (TTE)	Target	Realisasi (TTE)
IPP	6	6	9	8	12	10
APD	10	8	12	10	10	8
AN	3	2	5	4	11	10
Investigasi	2	2	2	2	3	3
P3A	0	0	0	0	1	1
Jumlah	21	18	28	24	37	32

Pada Triwulan I Tahun 2022 terdapat 3 topik yang SHPnya belum final sebagai berikut:

- Bidang APD Topik Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah, melalui Ketepatan dan Efektivitas Penggunaan Dana Transfer (fokus pada sektor pendidikan dasar dan menengah) geser di Triwulan III
- Bidang APD Topik Pengawasan Sisa Bos Tahun 2011 dan 2019 pada Pemerintah Daerah belum membuat SHP, file yang diinput dalam sima X berupa laporan hasil pengawasan dalam bentuk word
- Bidang Akuntan Negara Topik Pengembangan Potensi Desa yang diupload hanya surat tugas

Pada Triwulan II Tahun 2022 terdapat 4 topik yang SHPnya belum final sebagai berikut:

- Bidang APD Topik Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah, melalui Ketepatan dan Efektivitas Penggunaan Dana Transfer (fokus pada sektor pendidikan dasar dan menengah) geser di Triwulan III
- Bidang APD Topik Peningkatan Akuntabilitas Aset Daerah belum input. Dalam SIMA-X hanya terdapat penjelasan berdasarkan Surat Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah Npmor S-90/D3.01/2022 tanggal 5 Juli 2022, PP ini akan dieksekusi pada Minggu ketiga bulan Juli Tahun 2022
- Bidang AN Topik P3DN Badan Usaha yang diupload berupa laporan final
- Bidang IPP Topik Program Indonesia Pintar (KIP dan KIP Kuliah) belum diinput

Pada Triwulan III Tahun 2022 terdapat 5 topik yang SHPnya belum final sebagai berikut:

- Bidang APD topik P3DN Pemerintah Daerah masih draft.
- Bidang APD topik Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah masih draft.
- Bidang AN topik Penanganan Covid-19-Pembayaran Klaim RS masih draft
- Bidang IPP topik Kartu Sembako masih draft
- Bidang IPP topik Penanggulangan Bencana geser triwulan IV

Rincian lebih lanjut lihat lampiran 3 2

4. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT) yang Mendukung Pencapaian *Outcome* dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

a. Target Output Pengawasan

Bedasarkan Revisi RKAKL Tahun 2022 tanggal 23 September 2022 dan Aplikasi SIMA sampai dengan 30 September 2022 target Pengawasan Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta Tahun 2022 beserta anggarannya adalah sebagai berikut:

No	Kode	Program/Kegiatan /Rincian Output (RO)	Vol	Anggaran	Bidwas	Topik	PKPT	PP
	3701							
A	FAG	Pengawasan Pembangunan (baseline)						
1	3701.FAG.005	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	2	85.000.000	APD	2	2	3
					IPP	2	2	2
2	3701.FAG.011	Rekomendasi hasil pengawasan pengembangan JFA	1	21.731.000	P3A	1	1	3
3	3701.FAG.012	Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	1	45.784.000	P3A	1	1	8
4	3701.FAG.U02	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	7	191.782.000	APD	11	12	37
					P3A	1	1	4
5	3701.FAG.U06	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha	1	55.998.000	AN	3	4	15

No	Kode	Program/Kegiatan /Rincian Output (RO)	Vol	Anggaran	Bidwas	Topik	PKPT	PP
6	3701.FAG.U07	Rekomendasi hasil pengawasan pengendalian korupsi	1	28.180.000	Investigasi	1	1	10
Jumlah A			13	428.475.000		22	24	82
B.								
	FAG	Pengawasan Pembangunan (ABT)						
1	3701.FAG.001	Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi	1	59.566.000	APD	1	1	2
2	3701.FAG.003	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	38	2.331.292.000	APD	4	4	34
					IPP	26	32	39
					AN	5	5	5
					Invest	3	3	3
					P3A	1	1	12
Jumlah B			39	2.390.858.000		40	46	95
C								
	UAG	Pengawasan Pembangunan Baseline						
1	3701.UAG.U03	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	21	1.745.796.000	APD	9	11	36
					AN	11	12	15
					Investigasi	4	4	20
					IPP	23	28	73
2	3701.UAG.U09	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah	2	97.985.000	APD	1	1	8
					P3A	1	1	12
3	3701.UAG.U10	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha	1	118.242.000	AN	2	2	6
Jumlah C			24	1.962.023.000		51	59	170
Jumlah Total			76	4.781.356.000		113^{*)}	129	347

Keterangan:

*) Jumlah topik pengawas dalam aplikasi SIMA sebanyak 91 topik. Jumlah 113 topik pengawasan karena topik yang diampu oleh lebih dari satu bidang maupun karena beda pembebanan anggaran.

Rincian topik lihat Lampiran 2

b. Realisasi Rincian Output (RO) PKPT

Berdasarkan laporan PP 39 sampai dengan 30 September 2022 realisasi rincian output (berdasarkan SHP yang sudah final) sebagai berikut:

No	Kode	Target		Realisasi	Capaian (%)
		Program/Kegiatan/Rincian Output (RO)	Vol (lap)	Vol (Lap)	
	3701				
A	FAG	Pengawasan Pembangunan (baseline)			
1	3701.FAG.005	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	2	1	-
2	3701.FAG.011	Rekomendasi hasil pengawasan pengembangan JFA	1	1	100,00
3	3701.FAG.012	Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	1	-	-
4	3701.FAG.U02	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	7	10	142,00
5	3701.FAG.U06	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha	1	2	200,00
6	3701.FAG.U07	Rekomendasi hasil pengawasan pengendalian korupsi	1	3	300,00
Jumlah A			13	16	123,07
B.	FAG	Pengawasan Pembangunan (ABT)			
1	3701.FAG.001	Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi	1	-	-
2	3701.FAG.003	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	38	8	21,05
Jumlah B			39	8	
C	UAG	Pengawasan Pembangunan Baseline			
1	3701.UAG.U03	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	21	30	142,86

No	Kode	Target		Realisasi	Capaian (%)
		Program/Kegiatan/Rincian Output (RO)	Vol (lap)	Vol (Lap)	
2	3701.UAG.U 09	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah	2	-	-
3	3701.UAG.U 10	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha	1	2	300,00
Jumlah C			24	33,32	127,50
Jumlah Total			76	57	75,00

Rincian lihat Lampiran 3.

c. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)

Berdasarkan aplikasi *New MONSIMA*, realisasi penugasan pengawasan s.d Bulan September 2022 sebanyak 318 PP atau tercapai 92,71% dari rencana Tahun 2022 sebanyak 343 Penugasan Pengawasan (PP). Realisasi penerbitan Laporan Hasil Pengawasan s.d. Bulan September 2022 sebanyak 247 LHP atau 72,01% dari rencana Tahun 2022 sebanyak 347 LHP. Sedangkan realisasi penerbitan Laporan Hasil Pengawasan s.d. Bulan September 2022 sebanyak 247 LHP, apabila dibandingkan dengan penerbitan surat tugas sebanyak 318 ST, realisasi penerbitan laporan telah tercapai 77,67%.

Realisasi PKPT Tahun 2022 s.d. September 2022 sebanyak 95 PKPT atau 73,64% dari rencana PKPT Tahun 2022 sebanyak 129 PKPT. Realisasi PKPT mengacu pada penerbitan laporan. Rincian realisasi PKPT, penerbitan surat tugas dan penerbitan Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

No	Bidang	Target		Realisasi			Capaian (%)			% Realisasi LHP Dibandingkan Realisasi ST
		PKPT	PP	PKPT	PP	Lap	PKPT	PP	Lap	
1	2	3	4	5	6	7	8=5/3	9=6/4	10=7/4	11=7/6
1	IPP	62	114	35	98	73	56,45	85,96	64,03	74,49
2	APD	31	120	28	82	70	90,32	68,33	58,33	85,37
3	AN	23	41	21	54	50	91,30	131,70	121,95	92,59
4	Investigasi	8	33	7	31	23	87,50	93,94	69,70	74,19
5	P3A	5	35	4	53	31	80,00	151,43	88,57	58,49
Jumlah		129	343	95	318	247	73,64	92,71	72,01	77,67

Dari hasil monitoring pada aplikasi *New MONSIMA* terdapat PKPT yang RMPnya sampai dengan bulan September 2022, namun belum diterbitkan surat tugasnya sebagai berikut:

No	Bidang	ID PKPT	Nama PKPT	RMP	TW PKPT	Keterangan
1	AN	103039	Pengawasan Fasilitas Kredit Pemerintah untuk UMKM (Non KUR dan subsidi bunga/subsidi margin)	Agustus	3	Menunggu pedoman dan arahan rendal
2	AN	103206	Reviu Tata Kelola SPAM pada BU Jasa Air	April	4	Menunggu pedoman dan arahan rendal.
3	IPP	103813	Pengawasan atas Program Penanggulangan Bencana	Juli	3	Belum ada surat dan pedoman dari rendal
4	IPP	107343	(ABT) Pengawasan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng dan Warung yang disalurkan oleh TNI dan Polri	Agustus	3,4	Belum ada surat dan pedoman dari rendal

d. Target dan Realisasi Program Kegiatan Administrasi Umum (PKAU)

Berdasarkan laporan PP 39 sampai dengan 30 September 2022 realisasi PKAU sebagai berikut:

No	Nama PKAU	Target 2022 (lap)	Realisasi sd September (lap)	% Capaian
1	Penyusunan RKA dan Revisi	1	1	100
2	Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran	1	-	-
3	Penyusunan Laporan KLPBU	1	-	-
4	Pengelolaan Publikasi dan Kehumasan	1	1	100,00
5	Gaji dan Tunjangan	1	-	-
6	Operasional Pemeliharaan Perkantoran	1	-	-
7	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1	1	100,00
8	Penilaian Angka Kredit	2	1	50
9	Pengadaan Barang dan Jasa	1	-	-
10	Penyelenggaraan SPIP dan MR	1	-	-
11	Penyusunan Bahan Perencanaan, RKT dan Perkin	1	1	100,00
12	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	4	3	75,00
13	Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan	1	-	-
14	Penyelenggaraan RB dan ZI	1	1	100,00
Jumlah		18	9	50,00

e. Penggunaan Hari Produktif

Realisasi penggunaan hari produktif pengawasan PKPT sampai dengan September 2022 adalah sebanyak 11.239 OH atau 83.15% dari rencana hari pengawasan satu tahun sebanyak 13.239 OH dengan rincian sebagai berikut:

No	Bidang	Target OH	Realisasi OH	%
1	IPP	4.541	3.234	71,22
2	APD	3.944	3.262	82,71
3	AN	2.933	2.200	75,01
4	Investigasi	827	519	62,76
5	P3A	994	1.793	180,38
Jumlah		13.239	11.008	83,15

f. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran s.d. Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp21.983.720.390,00 atau 65,96% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp33.330.293.000,00. Rincian realisasi pengawasan sebagai berikut:

- Realisasi anggaran Program Pengawasan Pembangunan s.d. Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp1.751.565.874,00 atau 36,63% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp4.781.356.000,00.



- Realisasi anggaran Program Dukungan Manajemen s.d. Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp20.232.154.516,00 atau 70,87% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp28.548.937.000,00.



Rencana dan realisasi anggaran s.d. bulan Triwulan III Tahun 2022 secara rinci lihat di Lampiran 4.

g. Hal-hal yang perlu diperhatikan

Sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- Terdapat SHP yang belum final
- Penyerapan anggaran Program Pengawasan Pembangunan masih rendah yaitu baru sebesar 36,63% dari anggaran.
- Terdapat PKPT yang RMPnya sampai dengan bulan September 2022 namun belum diterbitkan surat tugasnya sebanyak 4 PKPT yaitu Bidang AN sebanyak 2 PKPT dan Bidang IPP sebanyak 2 PKPT. Dari 4 PKPT tersebut menunggu pedoman dari Rendal.

h. Usulan/Saran Perbaikan

Atas hal-hal yang perlu diperhatikan di atas, kami menyampaikan usulan/saran sebagai berikut:

Atas hal-hal yang perlu diperhatikan di atas, kami menyampaikan usulan/saran sebagai berikut:

- Bidang-bidang yang SHPnya masih draft untuk segera menyelesaikan dan diunggah dalam aplikasi SIMA-X
- Bidang AN dan IPP untuk PKPT yang belum ada pedoman dari Rendal agar Bidang selalu berkomunikasi dengan Rendal.
- Semua Bidang Pengawasan segera mempercepat penyerapan anggaran.

Demikian kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta s.d. Triwulan III Tahun 2022. Atas perkenan Bapak Kepala Perwakilan, kami ucapkan terima kasih.

Korwas Bidang P3A,

Ratna Wijihastuti

**Target dan Realisasi Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja
Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2022**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi				
			Satuan	2022		2024		TW III Tahun 2022	% Realisasi thd target TW III	% Realisasi thd target 2022	% Realisasi thd target 2024
				5	6	6	6				
1	2	3	4	5	6	6	5	6	7	8	
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1 Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rp (Juta)	350,00	701,00	1.029,00	4.676,80	1.336,23	667,16	454,50	
		1.2 Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi	Rp (Juta)	1.197,00	2.394,49	1.714,00	4.928,68	411,75	205,83	287,55	
		1.3 Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rp (Juta)	153.728,00	154.478,00	112.999,00	128.372,76	83,51	83,10	113,67	
		1.4 Nilai penyelamatan keuangan Negara dan daerah	Rp (Juta)	-	99.430,00	103.964,00	783,96	-	0,79	0,75	
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1 Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	1,00	1,00	1,00	2,00	200,00	200,00	200,00	
		2.2 Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	-	85,00	85,00	-	-	-	-	
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	3.1 Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	
		3.2 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	11,00	11,00	11,00	11,00	100,00	100,00	100,00	
		3.3 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1,00	1,00	2,00	1,00	100,00	100,00	50,00	
		3.4 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	19,00	19,00	26,00	31,00	163,16	163,16	119,23	
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	4.1 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		4.2 Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	80,00	80,00	90,00	100,00	125,00	125,00	111,11	
		4.3 Jumlah Pemda menindak lanjut Area Of Improvement dari hasil pengukuran EPK	Pemda	1,00	1,00	1,00	2,00	200,00	200,00	-	
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/LP/BU	5.1 Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Prov	-	1,00	1,00	1,00	-	100,00	100,00	
		5.2 Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Kab/kota	-	11,00	11,00	11,00	-	100,00	100,00	
		5.3 Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Prov	-	1,00	1,00	1,00	-	100,00	100,00	
		5.4 Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Kab/kota	-	11,00	11,00	11,00	-	100,00	100,00	
		5.5 Jumlah Provinsi dengan MRI ≥ Level 3	Prov	-	1,00	1,00	1,00	-	100,00	100,00	
		5.6 Jumlah Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3	Kab/kota	-	3,00	8,00	-	-	-	-	
		5.7 Persentase desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Persen	100,00	100,00	65,00	72,79	72,79	72,79	111,98	
		5.8 Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskudes	APIP	3,00	4,00	6,00	5,00	166,67	125,00	83,33	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi					
			Satuan	TW III Tahun 2022	2022	2024	TW III Tahun 2022	% Realisasi thd target TW III	% Realisasi thd target 2022	% Realisasi thd target 2024	
1	2	3	4	5	6	6	6	5	6	7	8
		5.9	Persen	66,67	66,67	75,00	87,49	58,33	87,49	87,49	77,77
		5.10	Desa	95,00	135,00	511,00	277,00	277,00	291,58	205,19	54,21
		5.11	BLUD	-	4,00	7,00	-	-	-	-	-
6	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	6.1	Skor Skala 100	-	90,00	75,00	91,69	91,69	-	101,88	116,06
		6.2	Skor Skala 100	-	95,00	90,00	98,45	98,45	-	103,63	109,39
		6.3	Persen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00
		6.4	Nilai	-	80,00	-	-	-	-	-	-
		6.5	Skor Skala 100	-	87,00	84,00	90,80	90,80	-	104,37	108,10
		6.6	Persen	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-
		6.7	Persen	-	65,00	-	93,00	93,00	-	143,08	-
		6.8	Indeks Skala 100	-	75,00	81,00	84,85	84,85	-	113,13	104,75

REALISASI SHP DALAM SIMA-X SAMPAI DENGAN TW III TAHUN 2022

No	Topik	PKPT	Bidwas	Rincian RO	ket	TW1		TW2		TW3	
						SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X	SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X	SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X
1	Audit Keuangan atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	105295	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UJAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline						
							V	sudah TTE	V	sudah TTE	
2	Audit Keuangan atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	105299	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UJAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline						
3	Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	103055	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UJAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline						
4	Bantuan Operasional Sekolah	101459	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UJAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline	V	Sudah TTE				
5	Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro	102987	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UJAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline						
6	Bantuan Stimulus kepada Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Masa Pandemi Covid-19	102480	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
7	Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan	106565	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UJAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline	V	Sudah TTE	V	Sudah TTE		
8	Bimtek Manajemen Risiko Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 pada KPU dan Bawaslu	105821	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UJAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline					V	Sudah TTE
9	BLU/BLUD (Fokus pada BLU/BLUD Kesehatan dan BLU/BLUD Pendidikan)	101078	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.FAG.U06 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha	Baseline			V	Sudah TTE	V	Sudah TTE
10	BLU/BLUD, BUMD, BUMDES	105285	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.UJAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline						
11	BUMD (Fokus pada BU Jasa Air dan BPD)	102838	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.FAG.U06 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha	Baseline			V	sudah TTE		
	BUMD (Fokus pada BU Jasa Air dan BPD)	103149	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.FAG.U06 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha	Baseline						

No	Topik	PKPT	Bidwas	Rincian RO	ket	TW1		TW2		TW3	
						SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X	SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X	SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X
12	BUMIN	102528	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.FAG.U06 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha	Baseline				V		Sudah TTE
13	Deteksi Kecurangan	102313	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline					V	Sudah TTE
	Deteksi Kecurangan	107267	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
14	Evaluasi pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	103810	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline					V	Sudah TTE
15	Evaluasi pada Perguruan Tinggi	103809	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline						
16	Fasilitas Kredit Pemerintah untuk UMKM (KUR dan subsidi bunga/subsidi margin KUR baik reguler maupun tambahan)	103025	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline			V			Sudah TTE
17	Fasilitas Kredit Pemerintah untuk UMKM (Non KUR dan subsidi bunga/subsidi margin Non KUR)	103039	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline						
18	Implementasi Bansos APBD	100795	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline			V			Sudah TTE
19	Implementasi Bansos APBDesa	101488	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline			V			Sudah TTE
20	Implementasi Bansos APBN (PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja)	105214	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline				V		Sudah TTE
21	pembangunan Jalan	102364	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
22	Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)	102340	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
23	Infrastruktur SPAM	102353	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
	Infrastruktur SPAM	103206	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline						

No	Topik	PKPT	Bidwas	Rincian RO	ket	TW1		TW2		TW3	
						SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X	SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X	SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X
24	Kapabilitas AP/PP	102287	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan AP/PP	49.UAG.U09 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah	Baseline						
25	Kartu Indonesia Pintar	107365	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
26	Kartu Indonesia Sehat	105228	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
27	Kartu Sembako	105226	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT					V	Belum TTE
28	Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional	101441	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline			V	Sudah TTE		
29	Kemudahan Perizinan (OSS)	102564	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U05 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	Baseline			V	Sudah TTE		
30	Kontribusi atas Pembangunan Nasional	105287	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U10 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha	Baseline			V	Sudah TTE	V	Sudah TTE
31	Kualitas Pengendalian Intern	105280	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U10 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha	Baseline						
32	Optimalisasi PAD	103100	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline			V	Sudah TTE		
33	Optimalisasi Pemanfaatan KPBU	102763	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline	V	Sudah TTE				
34	Optimalisasi Program Padat Karya	102417	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
	Optimalisasi Program Padat Karya	107644	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline					V	Sudah TTE
	P3DN Badan Usaha	107097	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline						
35	P3DN Badan Usaha	107127	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline			V	belum te		

No	Topik	PKPT	Bidwas	Rincian RO	ket	TW1		TW2		TW3	
						SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X	SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X	SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X
36	P3DN Badan Usaha	107305	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT				V		Sudah TTE
	P3DN Nasional	103194	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline			V			Sudah TTE
	P3DN Nasional	107309	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
37	P3DN Pemerintah Daerah	107054	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline			V			belum tte
	P3DN Pemerintah Daerah	107329	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
	P3DN Pemerintah Daerah	107489	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Program dan Palaporan serta Pembinaan APJP	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
38	Pemanfaatan APBD untuk PC-PEN (termasuk TKDD); Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah, melalui Ketepatan dan Efektivitas Penggunaan Dana Transfer (fokus pada sektor pendidikan dasar dan menengah)	100800	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline	V					
	Pemanfaatan APBD untuk PC-PEN (termasuk TKDD); Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah, melalui Ketepatan dan Efektivitas Penggunaan Dana Transfer (fokus pada sektor pendidikan dasar dan menengah)	100836	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline				V		Sudah TTE
39	Pembangunan Bandara	103205	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT					V	Sudah TTE
40	Pembangunan Jalur Kereta Api (termasuk kereta cepat Jkt - Bdg)	105494	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
41	Penanganan Covid-19-PBU (Alat Testing/Tracing, Almatkes, Obat dan Faskes)	106090	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline	V					Sudah TTE
42	Penanganan Covid-19-Pembayaran Klaim RS	101520	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline						
	Penanganan Covid-19-Pembayaran Klaim RS	105127	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline	V					Sudah TTE

No	Topik	PKPT	Bidang	Rincian RO	Ikt	TW1		TW2		TW3	
						SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X	SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X	SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X
43	Penanganan Covid-19-Vaksinasi	101860	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline	V	Sudah TTE	V	Sudah TTE	V	Sudah TTE
			Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline						
44	Penanggulangan Bencana	103813	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT					V	geser tw IV
			Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	49.FAG.U07 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan pengendalian korupsi	Baseline	V	Sudah TTE	V	Sudah TTE	V	Sudah TTE
45	Pencegahan Kecurangan	102308	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
			Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline	V	Sudah TTE	V	Sudah TTE	V	Sudah TTE
46	Penempatan Dana	105203	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.FAG.011 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan pengembangan JFA	Baseline					V	Sudah TTE
			Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APip	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline						
47	Penerapan JFA pada APip K/LUD	103664	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline						
			Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline						
48	Penggadaan PPPK Formasi Tahun 2022	103804	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.005 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	Baseline						
			Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline						
49	Pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara/daerah	104112	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline						
			Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline						
50	Pengawasan atas Hambatan Kelancaran Pembangunan	104103	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
			Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
51	Pengawasan atas Pengelolaan Sampah Terpadu (PST) Piyungan.	103063	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline						
			Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline						
52	Pengawasan atas Proyek Prioritas Strategis RKP Tahun 2022	105577	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
			Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
53	Pengawasan Pengadaan PPPK	107323	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline	V	file pdf tidak ada	V			
			Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline						
54	Pengawasan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Milyak Goreng PKL dan Warung yang disalurkan oleh TNI dan Polri	107343	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline						
			Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline						
55	Pengawasan Sisa Bos Tahun 2011 dan 2019 pada Pemerintah Daerah	103818	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline						
			Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline						

No	Topik	PKPT	Bidwas	Rincian RO	ket	TW1		TW2		TW3		
						SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X	SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X	SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X	
56	Pengawasan terhadap Program for Result untuk Disbursement Linked Indicators (DLI) Program Reformasi Bantuan Sosial	103812	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline							
57	Pengembangan DPSP	102770	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT							
		105507	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT							
58	Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha	102267	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT					V	Sudah TTE	
59	Pengembangan Kewirausahaan Baru untuk Pemulihan Ekonomi	106790	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.005 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	Baseline							
		101262	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline					V		Sudah TTE
60	Pengembangan Kewirausahaan, Kemitraan dan Keperantaraan	102255	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT							
		101132	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline					V	Baru surat tugas	Sudah TTE
61	Pengembangan Potensi Desa	101545	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	V							
		107302	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT							
62	Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP)	107342	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT							
		103814	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline							
63	Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	101475	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline					V	sudah TTE	
		103598	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT							
64	Peningkatan Akses Permodalan	103675	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline						V	sudah TTE
		105236	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT							

No	Topik	PKPT	Bidwas	Rincian RO	ket	TW1		TW2		TW3	
						SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X	SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X	SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X
65	Peningkatan Akuntabilitas Aset Daerah	105866	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline		V	belum ada			
66	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah	103816	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline						
		105663	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline	V	Sudah TTE	V	Sudah TTE		
	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah	105874	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline						
67	Peningkatan Aset Produktif	105240	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT				V	Sudah TTE	
68	Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah, melalui Kecepatan dan Efektivitas Penggunaan Dana Transfer (fokus pada sektor pendidikan dasar dan menengah)	107269	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U01 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT	V	geser tw 3	V	geser tw 3	V	Sudah TTE
69	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	103076	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline	V	Sudah TTE				
70	Peningkatan Sarana-Prasarana Pendidikan	103792	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT				V	Sudah TTE	
71	Peningkatan Tata Kelola Data Terpadu Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah (DTKS dan Basis Data Terkait Lainnya)	105135	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline	V	Sudah TTE				
72	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	103083	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline						
		103819	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline	V	Sudah TTE	V	Sudah TTE	V	Sudah TTE
73	Perencanaan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan	104827	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APJ	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	Baseline						
74	PKH	105221	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
75	Program Indonesia Pintar (KIP dan KIP Kuliah)	106593	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline	V	Sudah TTE	V	tidak ada inputan		

No	Topik	PKPT	Bidwas	Rincian RO	ket	TW1		TW2		TW3	
						SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X	SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X	SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X
76	Program Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Kesehatan	105718	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline						
77	Reformasi Birokrasi	100744	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT				V		Sudah TTE
78	Reformasi Sistem Kesehatan-Kualitas dan Redistribusi Tenaga Kesehatan	105132	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
79	Reformasi Sistem Kesehatan-Layanan Primer	105129	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
	Reformasi Sistem Kesehatan-Layanan Primer	107646	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline						
80	Reformasi Sistem Kesehatan-Layanan Rujukan	105130	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
81	Respons Kecurangan	102304	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline	V	Sudah TTE	V	Sudah TTE	V	Sudah TTE
	Respons Kecurangan	107288	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	103682	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline						
	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	103685	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas negara	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline				V	Sudah TTE	Sudah TTE
	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	103692	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline						
82	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	103695	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline						
	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	103805	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	105556	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline						
	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	107310	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	107319	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						

No	Topik	PKPT	Bidwas	Rincian RO	Ket	TW1		TW2		TW3	
						SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X	SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X	SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X
83	Revisi Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	107321	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
	Revisi Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	107334	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
84	SPIP	102295	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U09 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah	Baseline						
	Stunting	101482	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
85	Stunting	107643	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline					V	Sudah TTE
	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah	104822	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT					V	Sudah TTE
86	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	101507	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline					V	Belum TTE
	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	107338	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
87	Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa	101537	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline	V	Sudah TTE				
	Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa	101923	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline	V	Sudah TTE			V	Sudah TTE
88	Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa	106894	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan AP/PP	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline						
	Tata Kelola dan Perencanaan Pembangunan Desa	101531	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline	V	Sudah TTE				Sudah TTE
89	Tata Kelola dan Perencanaan Pembangunan Desa	103076	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT					V	Sudah TTE
	Tata Kelola Subsidi Pupuk	107474	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						

Ket TW 1=21 SHP Sudah TTE 18 SHP Ket TW 2=28 shp sudah tte=24 TW3=37 SHP sudah tte=32

JUMLAH TOPIK SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2022 DI APLIKASI SIMA

No	Topik	PKPT	Bidwas	Rincian RO	ket
1	Audit Keuangan atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	105295	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
	Audit Keuangan atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	105299	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
2	Audit Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Kementerian PUPR	103521	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
3	Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	103055	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U05 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	Baseline
4	Bantuan Operasional Sekolah	101459	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
5	Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro	102987	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
6	Bantuan Stimulus kepada Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Masa Pandemi Covid-19	102480	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
7	Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan	106565	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
8	Bimtek Manajemen Risiko Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 pada KPU dan Bawaslu	105821	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
9	BLU/BLUD (Fokus pada BLU/BLUD Kesehatan dan BLU/BLUD Pendidikan)	101078	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.FAG.U06 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha	Baseline
10	BLU/BLUD, BUMD, BUMDES	105285	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
11	BUMD (Fokus pada BU Jasa Air dan BPD)	102838	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.FAG.U06 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha	Baseline
	BUMD (Fokus pada BU Jasa Air dan BPD)	103149	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.FAG.U06 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha	Baseline
12	BUMN	102528	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.FAG.U06 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha	Baseline

No	Topik	PKPT	Bidwas	Rincian RO	ket
13	Deteksi Kecurangan	102313	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
	Deteksi Kecurangan	107267	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
14	Evaluasi pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	103810	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
15	Evaluasi pada Perguruan Tinggi	103809	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
16	Fasilitas Kredit Pemerintah untuk UMKM (KUR dan subsidi bunga/subsidi margin KUR baik reguler maupun tambahan)	103025	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
17	Fasilitas Kredit Pemerintah untuk UMKM (Non KUR dan subsidi bunga/subsidi margin Non KUR)	103039	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
18	Implementasi Bansos APBD	100795	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
19	Implementasi Bansos APBDesa	101488	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
20	Implementasi Bansos APBN (PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja)	105214	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
21	pembangunan Jalan	102364	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
22	Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)	102340	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
23	Infrastruktur SPAM	102353	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
	Infrastruktur SPAM	103206	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
24	Kapabilitas APIP	102287	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP	49.UAG.U09 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah	Baseline
25	Kartu Indonesia Pintar	107365	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
26	Kartu Indonesia Sehat	105228	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
27	Kartu Sembako	105226	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
28	Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional	101441	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline

No	Topik	PKPT	Bidwas	Rincian RO	ket
29	Kemudahan Perizinan (OSS)	102564	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U05 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	Baseline
30	Kontribusi atas Pembangunan Nasional	105287	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U10 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha	Baseline
31	Kualitas Pengendalian Intern	105280	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U10 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha	Baseline
32	Optimalisasi PAD	103100	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline
33	Optimalisasi Pemanfaatan KPBU	102763	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
34	Optimalisasi Program Padat Karya	102417	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
35	P3DN Badan Usaha	107097	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline
35	P3DN Badan Usaha	107127	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
35	P3DN Badan Usaha	107305	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
36	P3DN Nasional	103194	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
36	P3DN Nasional	107309	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
37	P3DN Pemerintah Daerah	107054	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
37	P3DN Pemerintah Daerah	107329	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
37	P3DN Pemerintah Daerah	107489	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP	49.FAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
38	Pemanfaatan APBD untuk PC-PEN (termasuk TKDD); Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah, melalui Ketepatan dan Efektivitas Penggunaan Dana Transfer (fokus pada sektor pendidikan dasar dan menengah)	100800	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline

No	Topik	PKPT	Bidwas	Rincian RO	ket
	Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah, melalui Kecepatan dan Efektivitas Penggunaan Dana dan Transfer (fokus pada sektor pendidikan)	100836	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline
39	Pembangunan Bandara	103205	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
40	Pembangunan Jalur Kereta Api (termasuk kereta cepat Jkt - Bdg)	105494	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
41	Penanganan Covid-19-PBJ (Alat Testing/Tracing, Almatkes, Obat dan Faskes)	106090	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
42	Penanganan Covid-19-Pembayaran Klaim RS	101520	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
	Penanganan Covid-19-Pembayaran Klaim RS	105127	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
	Penanganan Covid-19-Vaksinasi	101860	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
43	Penanganan Covid-19-Vaksinasi	105124	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
44	Penanggulangan Bencana	103813	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
	Pencegahan Kecurangan	102308	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	49.FAG.U07 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan pengendalian korupsi	Baseline
45	Pencegahan Kecurangan	107265	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	49.FAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
46	Penempatan Dana	105203	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
47	Penerapan JFA pada AP/PI K/L/D	103664	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan AP/PI	49.FAG.U011 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan pengembangan JFA	Baseline
48	Pengadaan PPPK Formasi Tahun 2022	103804	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
49	Pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara/daerah	104112	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
50	Pengawasan atas Hambatan Kelancaran Pembangunan	104103	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
51	Pengawasan atas Pengelolaan Sampah Terpadu (PST) Piyungan.	103063	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.U05 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	Baseline

No	Topik	PKPT	Bidwas	Rincian RO	ket
52	Pengawasan atas Proyek Prioritas Strategis RKP Tahun 2022	105577	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
53	Pengawasan Pengadaan PPPK	107323	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
54	Pengawasan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng PKL dan Warung yang disalurkan oleh TNI dan Polri	107343	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
55	Pengawasan Sisa Bos Tahun 2011 dan 2019 pada Pemerintah Daerah	103818	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline
56	Pengawasan terhadap Program for Result untuk Disbursement Linked Indicators (DLI) Program Reformasi Bantuan Sosial	103812	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
57	Pengembangan DPSP	102770	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
58	Pengembangan DPSP	105507	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
58	Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha	102267	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
59	Pengembangan Kewirausahaan Baru untuk Pemulihan Ekonomi	106790	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.005 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	Baseline
60	Pengembangan Kewirausahaan, Kemitraan dan Keperantaraan	101262	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
60	Pengembangan Kewirausahaan, Kemitraan dan Keperantaraan	102255	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
61	Pengembangan Potensi Desa	101132	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
61	Pengembangan Potensi Desa	101545	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
61	Pengembangan Potensi Desa	107302	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
61	Pengembangan Potensi Desa	107342	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
62	Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP)	103814	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
63	Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	101475	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
63	Peningkatan Akses Permodalan	103598	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT

No	Topik	PKPT	Bidang	Rincian RO	ket
64	Peningkatan Akses Permodalan	103675	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntansi negara	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
	Peningkatan Akses Permodalan	105236	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
65	Peningkatan Akuntabilitas Aset Daerah	105866	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah	103816	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah	105863	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah	105874	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
67	Peningkatan Aset Produktif	105240	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
68	Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah, melalui Kecepatan dan Efektivitas Penggunaan Dana Transfer (fokus pada sektor pendidikan dasar dan menengah)	107269	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.001 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
69	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	103076	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline
70	Peningkatan Sarana-Prasarana Pendidikan	103792	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
71	Peningkatan Tata Kelola Data Terpadu Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah (DTKS dan Basis Data Terkait Lainnya)	105135	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	103083	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline
72	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	103819	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
73	Perencanaan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan	104827	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP	49.FAG.012 - Pengawasan Pembangunan - Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	Baseline
74	PKH	105221	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
75	Program Indonesia Pintar (KIP dan KIP Kuliah)	106593	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline

No	Topik	PKPT	Bidwas	Rincian RO	ket
76	Program Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Kesehatan	105718	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
77	Reformasi Birokrasi	100744	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
78	Reformasi Sistem Kesehatan-Kualitas dan Redistribusi Tenaga Kesehatan	105132	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
79	Reformasi Sistem Kesehatan-Layanan Primer	105129	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
80	Reformasi Sistem Kesehatan-Layanan Primer	107646	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline
81	Reformasi Sistem Kesehatan-Layanan Rujukan	105130	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
81	Respons Kecurangan	102304	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
82	Respons Kecurangan	107268	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
82	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	103682	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
82	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	103685	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
82	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	103692	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
82	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	103695	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
82	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	103805	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
82	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	105556	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
82	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	107310	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
82	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	107319	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
82	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	107321	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
82	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	107334	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
83	SPIP	102295	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U09 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah	Baseline

No	Topik	PKPT	Bidwas	Rincian RO	ket
84	Stunting	101482	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
	Stunting	107643	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline
85	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah	104822	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
86	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	101507	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline
	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	107338	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
87	Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa	101537	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline
88	Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa	101923	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline
	Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa	106894	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline
89	Tata Kelola dan Perencanaan Pembangunan Desa	101531	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline
90	Tata Kelola Subsidi Pupuk	103078	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan negara	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT
91	Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa	107474	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT

Ket:

-Jumlah pkpt 129

-Jumlah topik 91

- Topik ABT 38 , dari 38 sebanyak 15 topik double dengan baseline dan 23 murni ABT, serta 2 topik di ampu oleh 2 bidang yaitu potensi desa (AN dan APD); P3DN daerah (APD dan P3A)

No	Topik	PKPT	Bidwas	Rincian RO	ket	TW1		TW2		TW3	
						SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X	SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X	SIMA-X	Realisasi Input SHP SIMA-X
83	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	107321	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	107334	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
84	SPIP	102295	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U09 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah	Baseline						
	Stunting	101482	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
85	Stunting	107643	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline					V	Sudah TTE
	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah	104822	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT					V	Sudah TTE
86	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	101507	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.UAG.U03 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Baseline					V	Belum TTE
	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	107338	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						
87	Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa	101537	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline	V					
	Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa	101923	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline					V	Sudah TTE
88	Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa	106894	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APJ	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline						
	Tata Kelola dan Perencanaan Pembangunan Desa	101631	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.U02 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	Baseline	V					Sudah TTE
89	Tata Kelola Subsidi Pupuk	103078	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT					V	Sudah TTE
91	Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa	107474	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	49.FAG.003 - Pengawasan Pembangunan - Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	ABT						

**REALISASI RINCIAN OUTPUT (RO)
(SHP FINAL)
SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2022**

No	Kode	Target		Realisasi		Capaian	Rincian SHP sudah Final
		Program/Kegiatan/Rincian Output (RO)	Vol (lap)	(Lap)			
A	FAG	Pengawasan Pembangunan (baseline)					
1	3701.FAG.005	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	2	1	50,00		Kemudahan Perizinan (OSS)
2	3701.FAG.011	Rekomendasi hasil pengawasan pengembangan JFA	1	1	100,00	1	Penerapan JFA pada APIP K/L/D
3	3701.FAG.012	Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	1	0	0,00		
4	3701.FAG.U02	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	7	10	142,86		1 Optimalisasi PAD 2 Pemanfaatan APBD untuk PC-PEN (termasuk TKDD); TW1 3 Pemanfaatan APBD untuk PC-PEN (termasuk TKDD); TW2 4 Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah 5 Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah TW 2 6 Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah TW 1 7 Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa 8 Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa TW 1 9 Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa TW 2 10 Tata Kelola dan Perencanaan Pembangunan Desa
5	3701.FAG.U06	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha	1	2	200,00		1 BLU/BLUD (Fokus pada BLU/BLUD Kesehatan dan BLU/BLUD Pendidikan) 2 BUMD (Fokus pada BU Jasa Air dan BPD)
6	3701.FAG.U07	Rekomendasi hasil pengawasan pengendalian korupsi	1	3	300,00		1 Pencegahan kecurangan TW1 2 Pencegahan kecurangan TWII 3 Pencegahan kecurangan TWIII
Jumlah A			13	17	130,77		
B	FAG	Pengawasan Pembangunan (ABT)					
1	3701.FAG.001	Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi	1		0,00		
2	3701.FAG.003	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	38	8	21,05		1 Kartu Sembako 2 Pembangunan Bandara 3 Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha 4 Peningkatan Aset Produktif 5 Peningkatan Sarana-Prasarana Pendidikan 6 Reformasi Birokrasi 7 Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah 8 Tata Kelola Subsidi Pupuk
Jumlah B			39	8	20,51		

C	UAG	Pengawasan Pembangunan Baseline				
1	3701.UAG.U03	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	21	30	142,86	1 Audit Keuangan atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri 2 Audit Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) 3 Bantuan Operasional Sekolah 4 Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro 5 Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan 6 Bimtek Manajemen Risiko Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 pada KPU dan Bawaslu 7 Deteksi Kecurangan 8 Evaluasi pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 9 Fasilitas Kredit Pemerintah untuk UMKM (KUR dan subsidi bunga/subsidi margin KUR) 10 Implementasi Bansos APBD 11 Implementasi Bansos APBDesa 12 Implementasi Bansos APBN (PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja) 13 Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional 14 Optimalisasi Pemanfaatan KPBU 15 P3DN Nasional 16 P3DN Pemerintah Daerah 17 Penanganan Covid-19-PBJ (Alat Testing/Tracing, Almatkes, Obat dan Faskes) 18 Penanganan Covid-19-Pembayaran Klaim RS 19 Penanganan Covid-19-Vaksinasi 20 Penempatan Dana 21 Pengembangan Kewirausahaan, Kemitraan dan Keperantaraan 22 Pengembangan Potensi Desa 23 Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 24 Peningkatan Akses Permodalan 25 Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah 26 Peningkatan Tata Kelola Data Terpadu 27 Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah 28 Program Indonesia Pintar (KIP dan KIP Kuliah) 29 Respons Kecurangan 30 Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)
2	3701.UAG.U09	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah	2	-	0,00	
3	3701.UAG.U10	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha	1	2	200,00	1 Kontribusi atas pembangunan nasional TW 1 2 Kontribusi atas pembangunan nasional TW 2
Jumlah C			24	32	133,33	
Jumlah Total			76	57	75,00	

PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
Realisasi Penyerapan Anggaran
s.d. September 2022

No	Kode	Program/IKK	Anggaran			Realisasi s.d. Bulan Ini (Rp)	Terhadap Anggaran 2022 (%)	% Capaian Penyerapan Terhadap Rencana s.d. Bulan Ini (%)
			Tahun 2022 (Rp)	s.d. Bulan Ini (Rp)				
1		2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	
A	089.01.CH	Program Pengawasan Pembangunan						
3	FAG.005	Rekomendasi Hasil Pengawasan	85.000.000,00	26.065.000,00	26.065.000,00	30,66%	100,00%	
4	FAG.011	Rekomendasi Hasil Pengawasan	21.731.000,00	10.780.043,00	10.780.043,00	49,61%	100,00%	
5	FAG.012	Hasil Koordinasi Perencanaan,	45.784.000,00	26.517.801,00	26.517.801,00	57,92%	100,00%	
6	FAG.U02	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas	191.782.000,00	150.493.031,00	150.493.031,00	78,47%	100,00%	
7	FAG.U06	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas	55.998.000,00	43.049.085,00	43.049.085,00	76,88%	100,00%	
8	FAG.U07	Rekomendasi Hasil Pengawasan	28.180.000,00	28.180.000,00	28.180.000,00	100,00%	100,00%	
		Sub Jumlah Program A	428.475.000,00	285.084.960,00	285.084.960,00	66,53%	100,00%	
B	089.01.CH	Pengawasan Pembangunan						
1	FAG.001	Rekomendasi Hasil Pengawasan	59.566.000,00	30.900.000,00	30.900.000,00	51,88%	100,00%	
2	FAG.003	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja	2.331.292.000,00	437.264.909,00	437.264.909,00	18,76%	100,00%	
		Sub Jumlah Program B	2.390.858.000,00	468.164.909,00	468.164.909,00	19,58%	100,00%	
C	089.01.CH	Program Pengawasan Pembangunan						
1	UAG.U03	Rekomendasi Hasil Pengawasan	1.745.796.000,00	928.186.486,00	928.069.970,00	53,16%	99,99%	
2	UAG.U09	Rekomendasi Hasil Pengawasan	97.985.000,00	50.431.035,00	50.431.035,00	51,47%	100,00%	
3	UAG.U10	Rekomendasi Hasil Pengawasan	118.242.000,00	19.815.000,00	19.815.000,00	16,76%	100,00%	
		Sub Jumlah Program C	1.962.023.000,00	998.432.521,00	998.316.005,00	50,88%	99,99%	
		Sub Jumlah Program Pengawasan	4.781.356.000,00	1.751.682.390,00	1.751.565.874,00	36,63%	99,99%	
B	089.01.WA	Program Dukungan Manajemen						
1	3676.EBA.962	Layanan Umum	456.280.000,00	243.034.585,00	242.975.538,00	53,25%	99,98%	
2	3676.EBA.994	Layanan Perkantoran	28.092.657.000,00	20.000.655.124,00	19.989.178.978,00	71,15%	99,94%	
		Sub Jumlah Program B	28.548.937.000,00	20.243.689.709,00	20.232.154.516,00	70,87%	99,94%	
		Total	33.330.293.000,00	21.995.372.099,00	21.983.720.390,00	65,96%	99,95%	